



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : WAWAN WIRAATMAJA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 631639

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.525.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 725 m2/180 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 25000 m2 di BARITO UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
5. Tanah Seluas 1600 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
6. Tanah Seluas 600 m2 di KOTA PALANGKA RAYA , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 5.000.000

1. MOTOR, YAMAHA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 58.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.100.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 15.000.000

Sub Total Rp. 1.608.600.000

III. HUTANG Rp. 40.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.568.600.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.